



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TOTO IFRIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **497878**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.230.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/200 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, WARISAN Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1298 m2/54 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **208.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI JB 424-GRAND VITARA A/T / JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 (4X2) AT / MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 250 RAB / SPD-MTR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS / SPD-MTR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BEJ AT / SPD-MTR/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **71.700.000**

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **25.637.461**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **3.535.337.461**



III. HUTANG

Rp. 28.207.380

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.507.130.081

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.